

# **PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**Etisa Riana Putri Sari**  
**B 300 090 031**

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : etisaviga@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yaitu berupa data keuangan daerah dan pusat serta investasi, PDRB, inflasi, serta data kependudukan di Jawa Tengah. Untuk menganalisis data, digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif berupa regresi linier berganda (kuadratik). Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa anggaran belanja pemerintah provinsi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan untuk belanja modal kurang begitu diperhatikan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi pada saat derajat desentralisasi tinggi, kebijakan desentralisasi fiskal tersebut justru akan menurunkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : *Belanja Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kesejahteraan Masyarakat*

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi ilmiah dengan judul:

**PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Yang ditulis oleh:

**ETISA RIANA PUTRI SARI**  
**B 300 090 031**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 19 Maret 2013

Pembimbing

**(Dr. Drs. Daryono Soebagyo, M.Ec)**  
**NIK : 929**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Dr. Triyono, S.E., Ak., M.Si.)**  
**NIK : 642**

## **PENDAHULUAN**

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan yaitu hubungan perintah pusat dengan daerah. Pada Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang dikenal dengan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang seharusnya disambut dengan positif. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya

Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi masalah dana perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam desentralisasi merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses desentralisasi. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem desentralisasi, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa desentralisasi tidak efektif untuk dilaksanakan.

Dari latar belakang tersebut dirumuskan beberapa tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Tengah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Desentralisasi Fiskal**

Kebijakan desentralisasi dilakukan Pemerintah pusat dengan memberi wewenang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola kapasitas fiskalnya, sekaligus juga menanggung beban-beban yang selama ini menjadi tanggung jawab pusat. Beban limpahan tersebut antara lain pegawai dari pusat, pemeliharaan aset-aset pusat yang dilimpahkan ke daerah, dan masih banyak lagi. Desentralisasi fiskal diwujudkan dalam bentuk kebijakan dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil baik dari pajak maupun sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh langsung terhadap keuangan daerah, khususnya terhadap sumber pendapatan daerah.

Ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat

kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah (Bird, 1980).

Seberapa jauh desentralisasi dapat dinilai dengan jelas, sebagian tergantung pada apakah yang sudah dilakukan lebih bersifat dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi. Hal ini juga tergantung apakah seseorang mengamatinya dari atas ke bawah (*top down*) atau dari bawah ke atas (*bottom up*) (Bird, 1980).

Dalam teori tentang desentralisasi fiskal terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu menurut *traditional theories* dan *new perspective theories* (Khusaini, 2006). *Traditional theories* menekankan pada keuntungan alokatif dari desentralisasi, dimana sumber informasi dan pengetahuan atas kebutuhan serta kondisi daerah lebih dikuasai oleh daerah sehingga pengambilan keputusan tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat lebih baik dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan *new perspective theories* menekankan pada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perilaku pemerintah daerah. Implikasi teori ini adalah desentralisasi akan mempengaruhi kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Daerah yang memiliki tekanan fiskal tinggi, maka dorongan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mengubah

struktur belanja semakin kuat (Halim, 2001). Daerah-daerah yang keadaan kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas fiskal mengindikasikan adanya tingkat kemandirian daerah yang rendah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pendapatannya melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar pada sektor-sektor yang produktif. Strategi alokasi dan efisiensi belanja ini terbukti mampu memicu pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah (tekanan fiskal tinggi), dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan dananya. Sehingga, kebijakan belanja yang diambil akan lebih produktif dan efisien. Setidaknya, dengan belanja yang lebih kecil akan mampu mendapatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang optimal dibandingkan dengan daerah dengan nilai belanja yang jauh lebih tinggi (tekanan fiskal rendah).

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Masalah kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang semestinya menjadi prioritas dalam arah dan kebijakan pembangunan daerah. Otonomi daerah selain diharapkan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, juga diperkirakan dapat memberikan akses terjadinya disparitas pembangunan di daerah. Kesenjangan dalam pembangunan daerah pada level prasarana, sarana, dan infrastruktur akan memberikan perbedaan pencapaian target pembangunan ke arah kesejahteraan masyarakat.

Negara kesejahteraan adalah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui

pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuat bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara pada masyarakat sosialis (Suharto, 2007).

Kesejahteraan masyarakat bisa digambarkan melalui tingkat inflasi suatu daerah atau negara. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.
2. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

3. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Inflasi yang tinggi akan menciptakan biaya sosial. Biaya sosial atas inflasi yang pertama adalah tingginya tingkat bunga nominal yang pada gilirannya menurunkan keseimbangan uang riil. Biaya inflasi yang kedua mendorong perusahaan untuk lebih sering mengubah harga (biaya menu). Biaya ketiga muncul karena perusahaan yang menghadapi biaya menu tidak sering mengubah harga, karena itu, semakin tinggi tingkat inflasi semakin besar variabilitas dalam harga-harga relatif sehingga menimbulkan inefisiensi mikroekonomi dalam alokasi sumber daya. Biaya inflasi keempat berasal dari undang-undang pajak. Banyak penggunaan tarif pajak tidak memperhitungkan efek inflasi, sehingga inflasi mendistorsi besarnya pajak yang dibebankan. Biaya inflasi kelima adalah ketidaknyamanan hidup di dunia dengan harga yang berubah (Mankiw, 2006).

### **Pertumbuhan Penduduk**

Dalam bukunya (Todaro, 2010) menyebutkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk pada akhirnya dihubungkan dengan kenaikan kerja, secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Jika angkatan kerja tersedia dalam jumlah yang lebih besar, berarti tersedia juga lebih banyak pekerja yang produktif, dan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan ukuran potensial pasar domestik.

Namun tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di Negara Sedang Berkembang (NSB) menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga juga relatif bertambah besar.

Selain itu, pertumbuhan penduduk akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja, sedangkan kemampuan NSB dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangatlah terbatas (Arsyad, 2010).

### **Investasi**

Indikasi keberhasilan suatu kegiatan ekonomi antara lain dari tingkat besaran investasi yang ditanamkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Investasi diartikan sebagai pengeluaran individu yang diperoleh dari alokasi pendapatannya setelah dikurangi konsumsi. Dengan kata lain setelah individu memperoleh pendapatan kemudian melakukan aktivitas konsumsi, setelah itu sisa dari pendapatannya ditabung atau diinvestasikan. Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan adanya atau tersedianya barang modal (Spartono, dkk, 2011).

Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan adanya atau tersedianya barang modal. Investasi adalah pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen barang-barang modal yang meliputi perumahan tempat tinggal dan juga persediaan (Dornsbush dan Fischer, 1995).

Pendapat lain mengartikan investasi sebagai beberapa cara penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan yang diharapkan datang dari hasil penanaman modal tersebut (Tandelilin, 2001). Selanjutnya diulas pula alasan mengapa seseorang melakukan

investasi. Alasan seseorang menanamkan modalnya antara lain :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang seseorang yang bijaksana akan berfikir upaya memperbaiki taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau dengan kata lain menghindari penurunan tingkat pendapatannya pada masa yang akan datang.
2. Mengurangi inflasi dengan mengambil alternative untuk berinvestasi berarti berkehendak untuk mempertahankan nilai harta kekayaannya agar tidak merosot nilainya akibat inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Oleh karena pemerintah memberikan fasilitas perpajakan yang sifatnya istimewa atau bersifat meringankan terutama kepada anggota masyarakat yang melakukan investasi pada bidang tertentu. Kebijakan fiskal ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya investasi dalam perekonomian (Tandelilin, 2001).

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dan masyarakat lainnya yang umumnya mempunyai potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1996).

Bigsten (1992) dalam Rindayati (2009) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum maupun akses terhadap

fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), investasi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, inflasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2011. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dinas atau instansi yang terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal provinsi Jawa Tengah (BKPM) serta dinas dan instansi terkait lainnya.

### **Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan:

1. Analisis deskriptif kualitatif
2. Analisis deskriptif kuantitatif

Model desentralisasi fiskal yang digunakan mengadopsi model yang digunakan Thiessen (2003) dan Akai (2007) yang mengasumsikan bahwa hubungan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat adalah kuadratik, yaitu  $IK = \alpha + \beta_1 DF + \beta_2 DF^2$ . Dengan demikian spesifikasi model menjadi sebagai berikut;

$$Inf = \beta_0 + \beta_1 DF_t + \beta_2 DF_t^2 + \beta_3 POP_t + \beta_4 INV_t + \beta_5 PM_t + \epsilon_t$$

Keterangan :

- Inf : Kesejahteraan Masyarakat  
DF : Desentralisasi Fiskal  
POP : Pertumbuhan Penduduk  
INV : Rasio Investasi terhadap PDRB  
PM : Pertumbuhan Penduduk Miskin  
 $\epsilon$  : Error

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mencapai tujuan pertama yaitu analisis implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi ini berkaitan dengan rasio pendapatan dan belanja daerah, komposisi penerimaan daerah, dan alokasi belanja daerah. Secara deskriptif akan dibandingkan implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil yang diperoleh secara rata-rata nasional. Untuk menganalisis tujuan kedua digunakan analisis kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Metode Ordinary Least Squares (OLS) merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual.

## **PEMBAHASAN**

Kemampuan keuangan provinsi Jawa Tengah selama pelaksanaan desentralisasi fiskal menunjukkan tren yang baik. Akan tetapi, masih terdapat celah ketergantungan terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kuncoro (2004) menjelaskan penyebab ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat tersebut, antara lain; (i) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah, (ii) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (iii) kendatipun pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan, dan (iv) adanya kekhawatiran akan terjadi disintegrasi dan separatisme bila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi.

Sementara itu, pada sisi belanja daerah, terlihat bahwa belanja pegawai masih cukup tinggi pada anggaran pemerintah provinsi. Tetapi, dalam perkembangannya porsi belanja pegawai ini menunjukkan trend yang fluktuatif, sementara alokasi belanja modal mengalami penurunan tetapi alokasi belanja barang dan jasa semakin meningkat. Dengan demikian ada pergeseran dalam alokasi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Jawa Tengah, dimana proporsi belanja barang dan jasa semakin meningkat dibandingkan belanja lainnya. Bahkan proporsi belanja barang dan jasa provinsi Jawa Tengah melebihi rata-rata belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2011. Dengan memperkuat dan memperbesar alokasi belanja barang dan jasa dalam anggaran daerah, artinya ada kecenderungan pemerintah provinsi melihat bahwa dengan kemampuan keuangan pemerintah yang ada dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah mengharuskan pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara efisien dan efektif atau bisa jadi ada kecenderungan lain dari tingginya alokasi belanja barang dan jasa tersebut. Melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut untuk menghindari pemborosan sekaligus mampu memelihara dan meningkatkan kondisi perekonomian. Proses pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah bukan hanya merupakan kegiatan rutin dalam memenuhi kebutuhan instansi, tetapi merupakan suatu kegiatan strategis dalam upaya memberi pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Selain proporsi yang besar dalam alokasi belanja barang dan jasa, seharusnya pemerintah provinsi juga lebih banyak mengalokasikan belanja modal agar dapat

mendukung terwujudnya kemandirian daerah dalam era desentralisasi fiskal. Abimanyu (2005) menjelaskan bahwa dalam desentralisasi fiskal, pemerintah provinsi harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin, terutama untuk belanja pegawai. Senada dengan itu, Davoodi dan Zou (1998) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan desentralisasi fiskal dalam beberapa hal menjadi kurang menguntungkan bagi pembangunan, antara lain komposisi pengeluaran pemerintah, penetapan pendapatan yang kurang tepat oleh pemerintah provinsi, keuntungan efisiensi desentralisasi fiskal yang kurang materiil di negara-negara berkembang dan ketidakcakapan aparatur daerah. Sebagaimana ditegaskan Halim (2001) bahwa tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.

Dengan demikian, perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang diiringi dengan alokasi belanja barang dan jasa yang semakin baik dan transparan pada anggaran pengeluaran provinsi Jawa Tengah akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (DF) berhubungan negatif dan signifikan mempengaruhi inflasi di provinsi Jawa Tengah, artinya desentralisasi fiskal terbukti positif mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Tengah, sementara variabel kuadrat desentralisasi fiskal (DF<sup>2</sup>)



memberikan hasil positif dan signifikan mempengaruhi inflasi di provinsi Jawa Tengah. Artinya desentralisasi fiskal akan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat pada saat derajat desentralisasi sudah terlalu tinggi.

Adapun persamaan model yang dihasilkan dari estimasi pengaruh desentralisasi fiskal pada indikator pengeluaran terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Tengah sebagai berikut;  $Inf = 123,6297 - 3,758908 DF + 0,029947 DF^2 + 1,383431 POP - 1,790882 INV + 0,569262 PM$

Persamaan tersebut diinterpretasikan bahwa pada saat desentralisasi fiskal masih rendah, maka penambahan 0,01 derajat desentralisasi fiskal (DF) yang diukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja pemerintah daerah akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat naik sebesar 3,758908 persen, namun pada saat desentralisasi terlampaui tinggi, maka penambahan Desentralisasi Fiskal (DF<sup>2</sup>) akan menurunkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,029947 persen.

Selama periode 2001-2011, nilai transfer ke daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat relatif belum terlalu tinggi, rata-rata hanya mencapai 30,70 persen. Dengan demikian ada kecenderungan derajat desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum masih belum terlalu tinggi sehingga hasil studi ini menemukan hubungan positif antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Prud'homme (1995) menengarai beberapa persoalan yang menjadi penyebab kegagalan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat antara lain; (i) pemerintah provinsi tidak dapat memenuhi preferensi masyarakat lokal, baik karena tidak adanya keinginan politik, maupun disebabkan oleh

aparatur yang kurang termotivasi dan atau memenuhi syarat untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, (ii) meningkatnya korupsi di tingkat lokal karena umumnya politisi dan birokrat lokal lebih rentan karena mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Karena itu jika pemerintah provinsi mampu menghilangkan ataupun mengurangi korupsi di tingkat lokal, maka desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi alokasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, (iii) adanya sistem politik yang tidak demokratis; sehingga premis dasar bahwa pemerintah provinsi memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyediakan barang publik lokal secara lebih efisien mungkin tidak berlaku (Tanzi, 1995). Dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis justru terdapat pandangan yang menganggap bahwa desentralisasi fiskal hanya sebagai alat yang digunakan oleh pihak pemerintah provinsi untuk mengeksploitasi sumber daya lokal dan nasional. Apabila pemerintah provinsi dapat mengeliminir berbagai faktor penghambat tersebut, maka akan semakin menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh variabel kontrol, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan penduduk miskin. Artinya, apabila pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan penduduk miskin meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Tengah meningkat cukup besar. Meskipun demikian secara umum, rata-rata derajat desentralisasi fiskal provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan tingkat

- yang tinggi, baik pada dari penerimaan maupun pengeluaran.
2. Komposisi pendapatan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, terutama dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Akan tetapi, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah secara rata-rata dari tahun 2000-2011 masih cukup besar. Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah, karena Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi.
  3. Proporsi pengeluaran pemerintah provinsi Jawa Tengah lebih banyak dialokasikan pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Alokasi belanja barang dan jasa provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan alokasi belanja modal dan pegawai, dan secara umum alokasi belanja barang dan jasa provinsi Jawa Tengah juga lebih besar dari rata-rata belanja modal seluruh provinsi di Indonesia. Akan tetapi, peningkatan alokasi belanja barang dan jasa seharusnya juga diiringi dengan peningkatan alokasi belanja modal. Porsi belanja modal yang besar sesungguhnya lebih baik dibandingkan jika anggaran daerah lebih terfokus pada belanja pegawai ataupun belanja barang dan jasa.
  4. Hasil studi variabel desentralisasi fiskal (DF) dan variabel kuadrat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada taraf signifikansi 0,05. Artinya

peningkatan desentralisasi fiskal ini akan membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada saat derajat (degree) desentralisasi fiskal belum terlalu tinggi, sementara pada saat derajat desentralisasi terlampaui tinggi, desentralisasi fiskal justru dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

## SARAN

1. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan penerimaan yang berasal dari transfer pusat. Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk penguatan local taxing power melalui revisi UU pajak dan retribusi daerah harus mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal.
2. Pemerintah daerah sebaiknya mengurangi porsi belanja barang dan jasa kemudian mengalokasikannya dalam belanja modal. Dengan perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik pada anggaran pengeluaran provinsi Jawa Tengah, maka akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah dengan derajat desentralisasi fiskal tinggi sebaiknya justru lebih berfokus untuk melakukan kebijakan efisiensi dan efektifitas pada anggaran pengeluaran pemerintah yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam studi ini variabel-variabel kontrol yang dipakai terdapat satu variabel yang tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara signifikan sehingga untuk peneliti lain

sebaiknya menggunakan variabel kontrol lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Studi ini masih terbatas pada provinsi Jawa Tengah. Untuk itu diperlukan studi yang lebih luas mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia, berbasis data Provinsi atau bahkan data kabupaten/kota se Indonesia, sehingga akan dapat diidentifikasi daerah-daerah yang perlu didorong

untuk meningkatkan derajat desentralisasi karena akan mempercepat kesejahteraan masyarakat secara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu
- Agustina, Dina. 2011. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap angka kematian bayi dan angka melanjutkan smp/mts periode 2007-2009 (studi kasus: Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro
- Akai, Nobuo, dkk. 2007. *Complementarity, Fiscal Decentralization and Economic Growth, Economics of Governance*. Heidelberg: Sep 2007. Vol. 8, Iss. 4; p. 339
- Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2009*. BPS. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2010*. BPS. Papua Barat
- Bacchetti, Leonardo, dkk. 2009. *The effects of age and job protection on the welfare cost of inflation and unemployment*. *European Journal of Political Economy* 26 (2010) 137-146
- Bank Indonesia. 2007. *Analisis Perilaku Inflasi di Propinsi JATENG*. Bank Indonesia. Semarang
- Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt. 1980. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Terjemahan oleh Almizan Ulfa. 2000. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhass Makasar
- Depkeu. 2009. *Nota Keuangan dan RAPBN 2010*
- Dornbusch, Fischer, Kearney. 1995. *Makroekonomi* : Edisi Australia
- Etzioni, Amitai. 1999. *The Limits of Privacy*. (New York : Basic Books, 1999)
- Fadjar A. D dan Britany Alasen Sembirin, 2007. *Efektifitas faktor input dan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia setelah desentralisasi fiskal*, *Wibiz Economic Research Centre*

- Gujarati, N Damodar. 2002. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan oleh Sumarno Zain
- \_\_\_\_\_. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. The McGraw–Hill Companies
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hartarti, Dwi Rini dan Arvian. 2012. *Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (Kkjs) dengan Model Indeks Indikator Non-Income*. Pusat Litbang Sosial Ekonomi Lingkungan
- Irawan. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Isdijoso, B. dan Wibbowo, T. 2002. *Analisa Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah, Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta, Kajian Ekonomi dan Keuangan* 1(6):22-56
- Jin, Jing & Zou, Heng-fu, 2005. *Fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China*, *Journal of Asian Economics*, Elsevier, vol. 16(6): 1047-1064, December
- J. Sachs and F. Larral, 1993, *Macroeconomics in The Global Economy* (Prentice Hall, New York)
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Keempat*. Jakarta: UPP STIM YKPN
- \_\_\_\_\_. 2007. *Metode Kuantitatif : Teori dan aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- \_\_\_\_\_. 2006. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Terjemahan oleh Fitria Liza dan Imam Nurmawan. 2007. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Masri, Marius. 2010. *Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001 – 2008)*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro

- Midgley, J. 2000. *Globalization, Capitalism and Sosial Welfare: A Sosial Development Perspective*. Canadian Sosial Work, Special Issue: Sosial Work and Globalization, 2(1):13-28
- Nuraini, Lusiana. 2011. *Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Ekonomi Sumatera Barat*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Prud'homme, Remy. 1995. *On The Danger of Decentralization*. Washington DC: *The World Bank, Policy Research Working Paper*, 1252.
- Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2011. *Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Good Governance di Bidang Tata Kelola Anggaran Terhadap Kapasitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Disertasi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Rindayati, Wiwiek. 2009. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat*. Tesis. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setyowati, Nunik. 2010. *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Klaten*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soekarno. 2011. *Analisis Dampak Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh Tahun 2004-2009*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Ekonometrika; Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Supartono, dkk. 2011. *Analisis Pengaruh Variabel Sosial Ekonomi Masyarakat Urban terhadap Kemandirian Ekonomi Ditinjau Dari Aspek Keuangan, Energi, dan Pangan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 No. 1 Mei 2011, 44-56.
- Swasono, Sri-Edi. 2004. *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pustep- UGM

- Tandelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi Pertama. Yogyakarta: PBF.
- Tanzi, V. 1995. *Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects,*” in: Bruno, Michael, and Boris Pleskovic (eds.). *Annual World Bank Conference on Development Economics 1995*. Washington, D.C: World Bank.
- Thiessen, Ulrich, 2003. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries, Fiscal Studies* Vol. 24 No. 3.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, 2010. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Xie, D., Zou, H., dan Davoodi, H. 1998. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States, Journal of Urban Economics* XLV:228-39.
- Zulyanto, Aan. 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.